



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RAPAT KERJA KOMISI VI DPRRI
DENGAN MENTERI PERDAGANGAN RI DAN
KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA (KPPU)**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : I (satu)
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 21 September 2021
Waktu : 10.34 s.d. 11.40 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR Republik Indonesia
Gedung Nusantara I Lt, Jl. Jenderal Gatot Soebroto,
Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Faisol Riza, S.S, Ketua Komisi VI DPRRI
Acara : Pembahasan Mengenai Penyusunan RKA K/L
Tahun Anggaran 2022 sesuai hasil Pembahasan
Badan Anggaran
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat
Komisi VI DPRRI
- Hadir : A. Anggota DPRRI:
39 dari 54 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
11 dari 12 orang Anggota
 1. Aria Bima
 2. Muhammad Prakosa
 3. Darmadi Durianto
 4. Rieke Diah Pitaloka
 5. ST. Ananta Wahana, S.H.
 6. Sonny T. Danaparamita
 7. I Nyoman Parta, S.H.
 8. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
 9. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
 10. Sondang Tiar Debora Tampubolon
 11. dr. H. Mufti A. Anam
 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
6 dari 8 orang Anggota
 1. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
 2. Ir. H. Mohammad Idris Laena
 3. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
 4. Doni Akbar, S.E.
 5. Trifena M. Tinal, B.Sc.

6. Drs. H. Bambang Heri Purnama, S.T.,
S.H., M.H.
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
4 dari 7 orang Anggota
 1. Andre Rosiade
 2. Khilmi
 3. Ir. H. La Tinro La Tunrung
 4. M. Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M.,
M.B.A.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
5 dari 5 orang Anggota
 1. Martin Manurung, S.E., M.A.
 2. Drs. H. Nyat Kadir
 3. H. Subardi S.H., M.H.
 4. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M.
 5. Muhammad Rapsel Ali
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA (F-PKB)
4 dari 6 orang Anggota
 1. Faizol Riza, S.S.
 2. Ir. H. M. Nasim Khan
 3. Tommy Kurniawan
 4. Marwan Ja'far
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
2 dari 5 orang Anggota
 1. Muhammad Dhevy Bijak
 2. Hj. Melani Leimena Suharli
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA (F-PKS)
3 dari 4 orang Anggota
 1. Amin AK., M.M.
 2. Hj. Nevi Zuairina
 3. Rafli
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)
3 dari 5 orang Anggota
 1. Abdul Hakim Bafagih
 2. Daeng Muhammad, S.E., M.Si.
 3. Hj. Intan Fauzi, S.H., L.L.M.
9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)
1 dari 2 orang Anggota

1. Elly Rachmat Yasin

B. Undangan:

1. Menteri Perdagangan RI
2. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (FAISOL RIZA, S.S./F-PKB):

Ada Pak Darmadi, ada Pak Mufti. Kita mulai saja ya.

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.***

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI yang hadir di ruang sidang. Ada Pak Demmer, ada Bu Nevi, ada Pak Darmadi dan Pak Mufti, Pak Nasim dan anggota yang juga hadir di virtual.

Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Saudara Muhammad Lutfi. Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Saudara M.Nawir Messi yang hadir secara virtual. Wakil Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA:

Mohon maaf, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Kenapa?

WAKIL KETUA KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA:

Pak Khodrat Wibowo, periodenya lain.

KETUA RAPAT:

Oh, ini wakil ketua.

WAKIL KETUA KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA:

Nawir Messi.

KETUA RAPAT:

Oh, Nawir Messi. Ini gimana bahannya, Nawir Messi.

Iya, Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang hadir secara virtual, Wakil Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Saudara Dr. Guntur S. Saragih, beserta seluruh jajaran.

Selamat pagi semuanya,

Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu Wa ta'ala, Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPRRI dengan Menteri Perdagangan RI dan Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha pada hari ini dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Dalam rangka menekan penyebaran pandemi Covid-19, maka rapat-rapat yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan mitra dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kehadiran fisik pada rapat-rapat komisi atau badan paling banyak 20% dari jumlah anggota atau komisi atau badan. Kehadiran fisik mitra kerja dan rapat-rapat di DPRRI dengan ketentuan paling banyak 20% dari kapasitas tempat duduk;
- Tata cara rapat di Komisi VI dilaksanakan secara fisik dan virtual. Peliputan pelaksanaan rapat dilakukan secara *live streaming* oleh TV Parlemen;
- Berdasarkan rapat, Pasal 249 Ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, menyebutkan bahwa untuk kepentingan administrasi, setiap anggota menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri rapat dan dikarenakan kondisi belum kondusif, maka daftar hadir anggota dapat dilakukan secara elektronik;
- Pada saat rapat berlangsung, diharapkan anggota dapat menjaga ketenangan karena *detail* suara terdengar oleh seluruh peserta rapat dan dikhawatirkan mengganggu jalannya rapat;
- Para peserta rapat apabila tidak, atau belum diberi kesempatan untuk berbicara, maka diharapkan dapat mematikan suara *microphone*;
- Rapat fisik dan virtual dilaksanakan dengan durasi maksimal 2 jam dan dapat diperpanjang maksimal 30 menit. Rapat, materi rapat wajib disampaikan oleh kementerian/lembaga. Materi rapat di-*share* ke anggota melalui grup *WhatsApp*;
- Setiap anggota berhak mengikuti rapat fisik dan virtual untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan melalui juru bicara, maupun dari setiap anggota raksi, interupsi ditiadakan;
- Alur rapat sebagai berikut: pembukaan, presentasi singkat, pertanyaan jubir, pertanyaan tanggapan kementerian, tanggapan balik, dan kesimpulan;
- Presentasi awal kementerian diberikan waktu 10 menit dan tanggapan 10 menit, tanggapan akhir 10 menit. Juru bicara diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan 5 menit dan tanggapan 3 menit;

- Lalu lintas rapat akan diatur oleh admin pada saat sesi tanya jawab dan kesimpulan, pimpinan yang memberikan hak berbicara kepada perwakilan masing-masing fraksi.

Bapak, Ibu, hadirin yang kami muliakan,

Menurut laporan sekretariat bahwa rapat pada hari ini rapat kerja dan rapat dengar pendapat pada hari ini telah dihadiri dan ditandatangani oleh 20 orang anggota. Satu orang anggota izin dengan jumlah fraksi, tujuh fraksi. Maka, dengan demikian kuorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 Ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

Oleh karena itu, dengan mengucapkan, *bismillahirrahmanirrahim*, saya membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Setuju?

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.34 WIB)

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Menteri Perdagangan RI dan Komisi Persaingan, Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) atas kesediaan waktunya menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat sesuai dengan undangan pada yang telah kami sampaikan dengan agenda penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2020 sesuai hasil pembahasan badan anggaran.

Setuju ya, hadir secara virtual?

(RAPAT:SETUJU)

Bapak, Ibu, hadirin yang kami muliakan,

Pada hari ini Komisi VI DPRRI mengundang Menteri Perdagangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam rapat kerja untuk membahas penyesuaian RKA K/L Tahun 2022. Sesuai dengan surat dari Ketua Badan Anggaran Nomor: AG/12436/DPRRI/IX/2021 tanggal 16 September 2021, perihal penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2022, disampaikan hasil penyempurnaan RKA K/L dengan rincian sebagai berikut:

- Alokasi anggaran belanja kementerian lembaga Tahun Anggaran 2022 dalam miliaran rupiah;
- Kementerian, lembaga, Kementerian Perdagangan RAPBN berjumlah 2 triliun 380,1 miliar rupiah dan disepakati di badan anggaran dengan jumlah yang sama 2 triliun 380,1 miliar rupiah;
- Untuk KPPU 9, RAPBN Rp99, 7 miliar, tidak ada perubahan di APBN yang disepakati oleh badan anggaran Rp99,7 miliar.

Selanjutnya, kami persilakan kepada Saudara Menteri Perdagangan menyampaikan tanggapan atas penyesuaian RKA K/L Tahun 2022. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Saudara Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha

juga menyampaikan tanggapan atas penyesuaian RKA K/L tahun 2022 sesuai hasil pembahasan badan anggaran.

Saya persilakan kepada Menteri Perdagangan dan Komisi Persaingan Usaha.

MENTERI PERDAGANGAN (MUHAMMAD LUTFI):

Terima kasih, Bapak Pimpinan,
Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi, dan
Salam Sejahtera untuk kita semua.

Bapak Ketua dan Wakil Ketua Komisi VI DPRRI yang terhormat,
Bapak, Ibu Anggota Komisi VI DPRRI yang terhormat,

Puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa di mana pada hari ini kita bisa dapat bertemu dalam keadaan sehat *walafiat*. Suatu kehormatan bagi kami dapat bertatap muka dengan yang terhormat seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI.

Perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas undangan dari Komisi VI DPRRI untuk melakukan rapat kerja pada hari ini dengan agenda pembahasan penyusunan RKA K/L Tahun Anggaran 2022 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPRRI.

Bapak, Ibu, Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang terhormat,

Sebelum kami menyampaikan rencana kerja dan anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2022, berkenanlah kami terlebih dahulu menyampaikan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021.

Pada awal tahun 2021, Kementerian Perdagangan mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp3.028.964.712.000,-. Namun demikian, Kementerian Perdagangan diharuskan melaksanakan penghematan atau *refocusing* anggaran sebanyak 4 (empat) tahap dengan total sebesar Rp481.624.703.000,- sehingga, pagu anggaran, pagu alokasi anggaran Kementerian Perdagangan setelah dilakukan *refocusing*, realokasi pada tahun 2021 menjadi Rp3.135.948.908.000,-. Adapun realisasi anggaran Kementerian Perdagangan per-tanggal 20 September tahun 2021, yaitu sebesar Rp1.751.526.736.402,- atau 55,85% dari total pagu anggaran sebesar Rp3.135.948.908.000,-.

Bapak, Ibu Anggota Komisi VI yang terhormat,

Dapat kami sampaikan kembali bahwa dalam Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Nomor: S-634/MK.02/2021 dan Nomor: 516/MPDN tahun 2021

perihal pagu anggaran kementerian lembaga, penyelesaian rencana kerja, dan anggaran kementerian lembaga tahun anggaran 2022. Kementerian Perdagangan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp2.380.059.957.000,-

Selanjutnya, sesuai kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPRRI dengan Menteri Perdagangan pada tanggal 26 Agustus 2021, Komisi VI DPRRI telah menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.380.059.957.000,- yang dialokasikan dalam 4 program sebagai berikut:

- Yang pertama adalah program dukungan manajemen sebesar Rp1.233.291.149.000,-
- Program perdagangan dalam negeri sebesar Rp744.533.760.000,-
- Program perdagangan luar negeri sebesar Rp391.630.456.000,-
- Program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 10.650.276.000,-

Di samping itu, dalam kesimpulan rapat kerja tanggal 26 Agustus 2021, Komisi VI DPRRI juga menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2022. Komisi VI DPRRI sebagaimana Surat Menteri Perdagangan Nomor: 483/M-DAG/SD/6 tahun 2021 tanggal 11 Juni 2021 kepada Menteri PPN, Kepala Bappenas, dan Menteri Keuangan sebesar Rp488.738.240.000,- untuk membiayai beberapa kegiatan antara lain, penyelenggaraan Sail Tidore, Presidensi G20, persiapan ke tuan rumah ASEAN tahun 2023, serta ketentuan rumahan ICCO dan RTIC.

Perlu kami laporkan juga bahwa terkait Presidensi G20 di mana dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia, Menteri Perdagangan ditugaskan sebagai ketua pelaksana *side event*, maka setelah Kementerian Keuangan melakukan koordinasi, koordinasi lintas KL pada tanggal 7 September 2021, Kementerian Perdagangan kembali menyapa susunan tambahan anggaran sebesar 21,4 miliar untuk membiayai beberapa kegiatan *side event* G20, antara lain: penyelenggaraan Presidensi G20, pelaksanaan *show case* pameran Jakarta *islamic fashion show* dan *coffee corner*, fasilitasi kemitraan pemasaran *show case* produk dalam negeri, *workshop* internasional, dan *monitoring* dan pendampingan pelaksana *side event* Presidensi G20.

Selain itu, kami sampaikan bahwa alokasi pagu anggaran 2022 pada program dukungan manajemen lebih besar dari alokasi anggaran program teknis. Hal ini, karena semua belanja pegawai, gaji dan tunjangan, maupun belanja operasional untuk seluruh unit kerja di Kementerian Perdagangan dialokasikan pada program dukungan manajemen. Sementara, alokasi anggaran untuk program teknis dialokasikan khusus hanya untuk membiayai pelaksanaan program atau kegiatan sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMN, Renstra dan RKP kerja, rencana kerja tahun 2022.

Terakhir kami laporkan, juga bahwa sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait usulan tambahan anggaran Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2022 baik dari Kementerian PPN, Kepala Bappenas maupun dari Kementerian Keuangan. Namun demikian, apabila dengan pagu alokasi anggaran Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2022 ternyata tidak ada tambahan anggaran sesuai dengan usulan kami di atas, tentunya kami perlu melakukan optimalisasi dengan merelokasi anggaran yang ada baik antar program, maupun antar kegiatan agar pelaksanaan program atau kegiatan yang mendesak dan harus dilaksanakan pada tahun 2022 dapat kami laksanakan dengan baik, meskipun belum mendapatkan dukungan atau tambahan anggaran.

**Bapak Ketua dan Wakil Ketua Komisi VI yang terhormat,
Bapak, Ibu Anggota Komisi VI yang terhormat,**

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas setiap dukungan yang diberikan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI kepada Kementerian Perdagangan.

Demikian yang bisa kami sampaikan.

*Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumussalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Silakan, selanjutnya.

WAKIL KETUA KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA:

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sebelum saya mulai, saya mohon izin. Saya membacakan Wakil Ketua KPPU. Ketua kami tetap mengikuti lewat daring.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI yang kami hormati,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI yang senantiasa memberikan dukungan untuk kemajuan KPPU dan semoga kita senantiasa diberi kesehatan dalam menghadapi kondisi pandemik Covid-19 yang masih terus berlangsung.

Izinkan kami untuk menjelaskan beberapa hal yang menjadi agenda pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat hari ini terkait pembahasan rencana kegiatan dan anggaran KPPU tahun anggaran 2022.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI yang kami hormati,

Rencana kerja dan anggaran KPPU tahun anggaran 2022 telah disesuaikan dengan alokasi anggaran dan target *market* KPPU dengan tetap mencermati sasaran strategis pada program kerja yang akan dilaksanakan KPPU pada tahun 2022. Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2020-2024 sehingga pada tahun anggaran 2022, KPPU masih berperan dan memberikan kontribusi pada pelaksanaan prioritas nasional yang pertama, yaitu ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Sasaran program KPPU tahun anggaran 2022. Rencana strategis KPPU tahun 2020-2024 telah menegaskan juga sasaran masing-masing program KPPU tahun anggaran 2022 yaitu program pengawasan persaingan usaha dan program dukungan manajemen. Untuk melaksanakan kedua program tersebut pada tanggal 23 Juli 2021, KPPU telah menerima Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan dengan Nomor: S-634/MK.02/2021 dan 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tentang Penyampaian Pagu Anggaran KL dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran K/L Tahun Anggaran 2022 di mana KPPU mendapatkan pagu anggaran tahun anggaran 2022 sebesar Rp99.726.648.000,-. Program alokasi anggaran masing-masing tersebut adalah:

1. Program pengawasan persaingan usaha Rp16.408.023.000,-;
2. Program dukungan manajemen sebesar Rp14.130.428.000,-
Yang ketiga, belanja operasional sebesar Rp69.188.197.000,-.

Dapat kami sampaikan secara rinci di dalam Tabel 1 dan Tabel 2 dalam jawaban tertulis kami.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI yang kami hormati,

Pada kesempatan hari ini, kami sampaikan kembali bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tanggal 2 November 2020. Maka, beberapa undang-undang mengalami perubahan termasuk terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Secara rinci dapat kami cermati dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang berupa turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana dalam Pasal 119 terdapat keluasaan tugas dan fungsi KPPU sebagai berikut:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkoordinasi dengan instansi terkait;
3. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tempat pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap kemitraan dapat dilakukan bersama antara kementerian lembaga pemerintah, nonkementerian terkait dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI yang kami hormati,

Barangkali demikianlah paparan yang dapat kami sampaikan dan dengan penuh rasa hormat dan kami mengharapkan dukungan dari Komisi VI DPRRI agar KPPU senantiasa dapat mengemban amanah sesuai tuntutan undang-undang dan masyarakat.

Selanjutnya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan dalam atas kesempatan penyampaian paparan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPRRI.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Menteri Perdagangan RI dan ketua, yang mewakili Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang menyampaikan hasil koordinasi di antara pemerintah mengenai alokasi anggaran.

Saya tambahkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 dalam Rapat Kerja dengan Komisi Perdagangan, dengan Menteri Perdagangan bahwa kita menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2022 sesuai dengan surat Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Nomor S-634/MK.02/2021 dan nomor 561/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 sebesar Rp2.380.059.957.000,- yang dialokasikan ke dalam empat program, antara lain:

- Program dukungan manajemen sebesar Rp1.233.291.149.000,-;
- Program perdagangan dalam negeri sebesar Rp744.533.076.000,;
- Program perdagangan luar negeri sebesar Rp391.630.456.000,-; dan
- Program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp10.650.276.000,-.

Saya kira tidak ada perubahan ya, Pak Menteri dan teman-teman. Saya minta persetujuan penyesuaian atas pagu anggaran ini menjadi alokasi anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2022.

Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

Lalu untuk Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha dalam Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 31 Agustus tahun 2021, dipimpin oleh Pak Martin Manurung dalam kesimpulan nomor 3: Komisi VI DPRRI menyetujui Pagu Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha tahun 2022 sesuai surat dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: S-634/MK.02/2021 dan Nomor: 516/M.PPN./8.8D.8/KU.01.01/07/2021 sebesar Rp99.726.648.000,- dialokasikan kedalam program dukungan manajemen sebesar Rp14.130.628.000,- program pengawasan persaingan usaha sebesar Rp16.408.023.000,- pengawas pegawai, belanja pegawai sebesar Rp44.120.992.000,- dan belanja operasional sebesar Rp25.067.205.000,-.

Tidak ada perubahan, Pak. Sesuai dengan rapat ini kita setuju penyesuaian anggaran, alokasi anggaran untuk KPPU. Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

Baik.

Terima kasih.

Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati,

Sebelum pada kesimpulan, saya memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota memberikan tanggapan. Sebelum kita tutup.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Saya daftar nanti Pak Faisol. Tapi, pas sampai di sana aja. Saya udah di Semanggi. Andre, Bang Faisol.

F-PDIP (dr. H. MUFTI A.N. ANAM):

Daftar, Ketua.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Saya daftar pas di sana saja.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Daftar, Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Mufti Anam, Pak Andre, Pak Darmadi.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Saya daftar, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Bu Nevi, Bu Evita. Yang Bu Evita hari ini absen.

Baik.

Saya persilakan. Saya mohon waktunya agak dipercepat, kita mungkin hanya punya waktu sekitar 10 menit untuk memberikan tanggapan atas alokasi penyesuaian, alokasi anggaran masing-masing dari Kementerian Perdagangan dan KPPU.

Silakan, Pak Nasim.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Terima kasih.

**Ketua yang kami banggakan,
Pak Demmer, Wakil Pimpinan, dan
Seluruh Anggota yang kami banggakan,
Pak Menteri, Pak Luthfi,
Pak Sekjen, dan seluruh jajaran Kemendag,
Pak, siapa pak, lupa sampai, Pak Guntur, terima kasih, beserta jajaran
yang kami banggakan.**

Saya singkat saja, khususnya Pak Wisnu, Pak Bakti datang ya Pak. Oh, oke. Masker saya nggak kelihatan.

Saya simpel saja Pak Menteri. Saya berharap butuh penjelasan sedikit tentang Bappebti ini, ya kan *project* dan *report* dari Bappebti selama ini di 2021. Saya mohon gambaran, karena saya lihat anggarannya juga cukup lumayan, Pak. Tetapi, saya lihat masih banyak resi gudang di beberapa kabupaten yang tidak efektif atau hanya memang Bappebti yang penting tugasnya membangun dan meninggalkan atau harus memonitor atau apa, karena banyak di dapil saya, dan saya sudah mengirim surat kemarin ada ajuan kiriman surat kepada Bappebti ditembusannya juga kepada Kementerian Perdagangan, udah di-*report* kemarin Pak Menteri sama Pak Wamen sudah. Mungkin, kita akan adakan kunjungan kalau bisa, gak usah khawatir. Saya yang fasilitasi semua, nggak usah khawatir. Saya butuh penjelasan tentang Bappebti itu, Pak.

Termasuk di sini kebetulan di Banyuwangi ada saudara saya yang punya Banyuwangi, Pak. Walaupun Dapilnya Pasuruan, ini yang punya

Banyuwangi. Itu ada beberapa resi gudang yang dibangun oleh pemkab dan ada yang dibangun oleh Bappebti sampai sekarang mangkrak sudah bertahun-tahun, Pak. Nah, saya minta Bappebti dan Kementerian Perdagangan bisa memfasilitasi untuk diselesaikan masalah ini dan bisa berjalan dengan baik demi masyarakat, demi rakyat.

Itu saya kira.

Makasih.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Silakan, Ibu Nevi dulu.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Terima kasih.

**Pimpinan, dan
Anggota Komisi VI yang kami hormati,
Pak Menteri,
Ketua KPPU bersama jajarannya.**

Pak Menteri, yang pertama adalah untuk anggaran tambahan Pak Menteri, ini ada 488 miliar kurang lebih dan juga ada tambahan lagi 21 miliar. Ada kegiatan Sail Tidore, Presidensi G20 dan seterusnya. Apakah kegiatan ini Pak, bisa kita lakukan dengan *online* Pak? Biar kita bisa mengurangi apa namanya pengeluaran kita, Pak ya. Karena kan, seperti *Islamic Fashion Show* ini kan sebetulnya bisa Pak dengan *online*. Belum rasanya kita belum bisa untuk *offline* gitu. Jadi, kegiatan-kegiatan seperti ini yang Bapak tawarkan ini sebisa mungkin dengan *online* saja. Pasti *In Syaa Allah* akan berkurang ini-nya, Pak. Itu yang pertama.

Lalu Pak yang kedua adalah Badan Pangan Nasional, Pak. Yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden, apa keunggulan program tersebut dan terus bagaimana menghentikan aktivitas impor bahan pangan kita dengan adanya bahan pangan nasional sebagai regulator. Apa yang bisa dilakukan, dan terus pihak mana saja dilibatkan dan bagaimana sumber penggunaan anggaran badan tersebut.

Terus Pak Menteri yang terakhir, saya mengingatkan terus ya adalah kita harus terus melakukan pendampingan kepada para pedagang pasar, Pak Menteri dengan sistem *online*. Saya pikir ini target utama tahun 2022 Kemendag untuk menggunakan anggarannya karena kita tahu bahwa pandemi ini pasti akan, tahun depan mungkin belum selesai.

Dan terus juga untuk KPPU singkat kata aja. Pak Menteri juga bisa juga hadir yaitu bagaimana kita melakukan perang yah terhadap praktek monopoli.

Di mana di sini kita dengar Tokopedia dan Gojek sudah menjadi satu dan kita harapkan barang penjualan *online* ini juga, pelaku UMKM dalam negeri dilindungi. Tidak, tidak, tidak boleh pelaku UMKM dalam negeri akan ter-inikan apa produknya habis produknya, karena produk-produk luar negeri.

Itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Nevi.
Silakan, selanjutnya Pak Mufti Anam.

F-PDIP (dr. H. MUFTI A.N. ANAM):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang pertama, tentu kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya untuk Pak Menteri Perdagangan, Pak Lutfi, Pak Sesmen, Pak Susanto dan seluruh jajaran yang sudah berjibaku untuk bagaimana bisa memulihkan situasi dampak pandemi Covid-19 ini, begitu Pak.

Nah menurut catatan kami, ada beberapa catatan positif seperti nilai ekspor pada Agustus 2021, kemarin yang mencapai rekor tertinggi yaitu USD21 miliar gitu dan kemudian apa namanya, meskipun didorong karena kenaikan pasar komoditi di secara global, begitu Pak ya. Kami berharap surplus neraca perdagangan dalam negeri ini juga apa namanya bisa terus dipertahankan, Pak untuk bagaimana kedepan bisa jauh lebih meningkat begitu.

Nah, kemudian yang kedua soal ini, Pak apa harga pakan jagung begitu. Nah, ini ini memang kalau kata banyak temen-temen pelaku peternak kecil di daerah, ini apa yang dilakukan oleh Kemendag ini masih apa namanya sangat terlambat begitu, Pak. Karena kalau kita lihat, harga pakan jagung ini sebenarnya sudah naik sejak bulan Juni tahun 2021 begitu, sebelum akhirnya ada fenomena Pak Suroto di Blitar, yang karena kunjungan Pak Jokowi dia membentangkan apa protes, yang punya dia dipanggil ke istana.

Saya tidak yakin kalau tidak ada aspirasi dari Pak Suroto, ini terus tidak lanjutin begitu, Pak. Nah, karena kalau kita lihat faktanya, sebenarnya harga jagung ini sudah meningkat bahkan jauh sebelum bulan Juni 2021 begitu. Nah, sudah mulai merangkak naik.

Kemudian pada bulan Juni sudah melampaui harga yang ditetapkan oleh Permendag Nomor 7 Tahun 2020 yaitu Rp4.500,- yang kemudian hari ini Bapak cek di lapangan, harganya Rp7.500,- dan di beberapa daerah sudah Rp8.000,- atau hampir 100% dari Permendag Nomor 7 Tahun 2020. Nah,

artinya apa Pak, artinya ya memang di lapangan harganya tidak terkontrol dengan baik. Kami melihat bahwa Kemendag belum optimal dalam mengelola soal perdagangan apa namanya jagung ini, Pak. Nah, solusinya apa? Apakah solusinya kita harus impor begitu, tidak. Harapan kami tidak, karena jangan setiap persoalan yang ada di lapangan selalu solusinya impor dan impor. Kalau kita lihat, lihat data dari Kementerian Pertanian Pak, Bapak lihat bentar mohon izin teman-teman.

Kalau lihat kita lihat di data di Kementerian Pertanian, itu hari ini kita ini sebenarnya sedang surplus jagung lokal bahkan kalau kita lihat kemarin pernyataan Pak Menteri Pertanian itu, kita hari ini punya stok 2,3 juta ton per pekan ke 2 September 2021. Nah, kami berharap Kementerian Perdagangan bisa mengatur soal ini Pak. Ini kan sudah bisa diantisipasi ketika sebelum Bulan Juni dulu kan sudah ada kenaikan. Harapan kami sudah ada mitigasi untuk bagaimana menjemput bola ke para pelaku-pelaku penjual jagung ini untuk mereka segera mengeluarkan stoknya, untuk mereka menjual dengan harga yang sesuai dengan Permendag Nomor 7 Tahun 2020. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua adalah soal pedagang pasar rakyat atau pasar tradisional, yang ini kami lihat masih belum ada advokasi dari Kementerian Perdagangan soal pasar rakyat dan pasar tradisional ini. Kenapa kami melihat begitu, kalau pertama Bapak lihat bahwa yang dekat-dekat ini saja soal pemulihan ekonomi berbasis aplikasi pedulilindungi. Nah, yaitu termasuk di pasar rakyat. Nah, terbukti Kemendag mengakui bahwa pasar tradisional belum siap untuk apa namanya dengan pedulilindungi ini, Pak begitu. Antara lain karena sebagian besar dari mereka belum mendapatkan akses vaksinasi.

Nah, misalnya saat uji coba di pasar sederhana di Bandung kemarin, Pak Menteri sendiri yang menyatakan yang saya baca, saya lihat, saya dengar di media menyatakan bahwa baru 8,9% apa pedagang pasar rakyat yang mendapatkan akses vaksinasi. Nah, barulah kemudian setelah itu apa namanya Pak Menteri buru-buru meminta untuk pedagang pasar divaksinasi. Artinya apa? Artinya tidak ada mitigasi, tidak ada rencana dari sebelum ada *problem* ini bahwa pedagang pasar harus dilakukan vaksinasi secara besar-besaran, tidak ada sebelumnya sebelum ditemukan fakta ini. Padahal ini yang dekat dari Jakarta, di Bandung Pak.

Bagaimana dengan teman-teman di daerah di tempat kami, di Pasuruan, Probolinggo. Oh, Pak, pedagang pasarnya belum divaksinasi di sana, Pak pada saat pernyataan Pak Menteri ada itu. Barulah setelah itu berbondong-bondong di banyak daerah dilakukan vaksinasi massal di pasar-pasar yang itu atas inisiatif pemerintah daerah. Artinya apa? Artinya ya memang tidak ada pikiran dari Pak Menteri, tidak ada kepekaan dari Menteri Perdagangan untuk memberikan mereka vaksinasi secara massal, begitu Pak.

Karena, kalau kami lihat selama ini di mall-mall dan sebagainya sekarang sudah 100%, karena memang ada apa namanya perhatian khusus dari Pak Menteri untuk mereka agar segera vaksinasi, agar apa namanya mall bisa segera buka. Tapi, bagaimana dengan pasar rakyat yang ada di

daerah-daerah, di tempat-tempat kami. Ya, hari ini mereka masih banyak yang belum dilakukan vaksinasi ini, Pak.

Nah, harapan kami Pak, keberpihakan terhadap pedagang kecil ini terus dimunculkan. Karena sebenarnya, esensinya terhadap apa pasar rakyat ini yang bukan, mall iya, pasar rakyat juga. Tapi, satu jutaan rakyat kita ini banyak bergantung terhadap pasar-pasar tradisional yang ada di daerah-daerah begitu.

Kemudian yang kedua, soal insentif PPN bagi pedagang pasar yang menyewa di mall-mall begitu, Pak. Nah, ini rakyat kita merasakan ada ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat, karena apa, loh ini pedagang mall kok ada insentif PPN, kita kok di kampung-kampung, di pasar pasar rakyat kita ini kok masih ada tarif biaya sewa. Bapak tahu, mungkin Rp3.000,- 5.000,- biaya sewa perbulan ini buat jenengan nggak ada artinya, tapi buat mereka Pak, itu jangankan Rp3.000,-, Rp 1.000,- pun itu sangat berarti bagi masyarakat kami di daerah.

Nah, harapan kami perlu ada inisiatif kepada mereka untuk berikan insentif Pak, karena memang tidak bisa kebijakan dari pusat sehingga, perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah agar mengatur perda untuk bagaimana ada kelonggaran untuk mereka bisa membayar apa namanya ada insentif relaksasi terhadap biaya lapak-lapaknya yang ada di di tempat mereka.

Kemudian yang ketiga, Pak. Kemarin kami baru saja melakukan audensi serap aspirasi dengan kawan-kawan asosiasi pedagang pasar di tempat ini, seminggu yang lalu. Kami tanya kepada mereka bagaimana harapan ke depan, katanya gelap Pak. Pedagang pasar mau maju kena, mundur kena. Kalau maju tantangan digitalisasi luar biasa, perubahan zaman dari hari ke hari semakin tidak mudah dihadapi, tapi mau mundur mereka juga tidak tahu mundur tuh mau makan apa besok kan begitu. Nah, sehingga ini perlu ada solusi dari Pak Menteri untuk bagaimana mereka ini bisa ada harapan untuk bagaimana pasar tradisional sebagai basis apa ekonomi di desa-desa ini bisa terus berjalan.

Kemudian hari berikutnya Pak, kami mendapatkan jawaban kita serap aspirasi juga rapat kerja dengan temen-temen *e-commerce*, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak di sini, Pak. Mereka ternyata punya program digitalisasi pasar, Pak. Saya tanya, wah ini kok nggak nyampe ya ditempat kami di daerah. Iya Pak, karena kami punya anggaran terbatas. Kami lihat kenapa ya Kementerian Perdagangan tidak punya inisiatif untuk melakukan digitalisasi pasar ini, yang kami lihat apa ya kegiatannya hanya gerobak dan sebagainya yang itu sebenarnya tidak esensi, tidak tidak sesuatu yang dibutuhkan kan hari ini oleh masyarakat kita.

Mohon maaf, rakyat kita kalau hanya beli gerobak aja bisa. Tapi, bagaimana mereka menghadapi tantangan yang semakin hari semakin tidak mudah dihadapi itu diberikan solusi atas hal itu, Pak. Nah, lalu, kemarin kami tanya kepada Tokopedia. Apakah bisa diterapkan di seluruh pasar Indonesia, kata dia ini tidak mungkin. Karena, kami tidak punya anggaran yang cukup untuk melakukan itu. Maka, ini Pak harapan kami. Kementerian

Perdagangan ini jangan beralih Tokopedia ini kok kayaknya sepertinya Tokopedia yang memberikan solusi kepada rakyat kita, tapi Kementerian Perdagangan tidak punya solusi itu begitu. Nah, harapan kami, ke depan ada solusi dari Kementerian Perdagangan untuk melakukan advokasi kepada mereka, memberikan bimbingan soal digitalisasi ini.

Lalu pertanyaan selanjutnya mungkin, apakah mungkin orang-orang pedagang pasar di usia 50-60 tahun untuk apa belajar aplikasi dan digitalisasi, sangat mungkin, Pak. Saya kemarin melakukan di dapil kami, ada masyarakat kami, konstituen kami, usianya baru 60 tahun, oh sudah 60 tahun begitu. Dia tidak lulus SD, tapi saya paksa untuk belajar buka aplikasi *website*, tapi melalui apa WA. Saya kebetulan ada temen yang bisa mengelola bagaimana orang tinggal klik-klik itu, pesan melalui WhatsApp bisa.

Nah akhirnya, *si* orang kawan-kawan kami tadi apa namanya namanya Pak Haji Bisri, orang di pasar di salah satu Pasar Winongan. Dia ini selama ini Pak, jualan selama PPKM barangnya sepi, Pak. Tidak ada orang beli ayam, beli sayur aja nggak ada. Sehingga, kami apa kami berikan solusi untuk kami bikin aplikasi melalui WhatsApp tadi. Itu *alhamdulillah*, dia mau belajar dan hari ini bisa. Artinya apa, Pak? Sebenarnya masyarakat kita ini mau belajar kalau ada yang mengajari.

Mau berubah kalau ada yang mengajak untuk berubah. Nah, harapan kami ini isu krusial yang ada di masyarakat kami, yang ada di pasar-pasar, yang kemarin seperti kata temen-temen pedagang Asosiasi Pasar yang datang ke sini mereka tidak punya harapan lagi, harapan kami ini dibangun harapan di tengah-tengah mereka untuk bagaimana mereka bisa keluar dari situasi ini dan bisa menghadapi tantangan ini.

Kalau Bapak tahu, selama PPKM kemarin itu, saya ini kebetulan kan setiap rapat dan sebagian dari rumah. Nah, setiap hari istri saya ini kalau mau beli belanja nggak perlu ke pasar, Pak. Jadi, dia melalui aplikasi ada di Tokopedia, kadang melalui ada orang-orang di *online* di Instagram itu hanya pesan klik-klik dan sebagainya, itu sudah bisa pesen sayur apa namanya, ayam dan sebagainya. Saya yakin ini Pak, kalau ini bisa di apa dimotori oleh Kementerian Perdagangan untuk bagaimana bisa diterapkan di pasar-pasar seluruh Indonesia, saya yakin teman-teman di pasar-pasar ini bisa semakin optimis untuk menghadapi perubahan zaman ini, Pak.

Itu sedikit dari kami.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Walaikumsalam.

Ya, saya rasa karena ini kita juga mau Paripurna. Kita kan jam 11 udah mau mulai. Kita ini sedang membahas, jadi kita diharuskan membahas

anggaran. Kalau bisa mungkin lebih fokus kepada anggaran ini. Nanti, kalau bulan November ke depan. Masa sidang yang depan, kita pengawasan seluruhnya aja. Nggak ada anggaran sudah nggak diperlukan lagi.

Silakan.

F-PDIP (dr. H. MUFTI A.N. ANAM):

Tapi, persoalan jagung tadi itu tadi memang. Ya, *sorry sorry*.

KETUA RAPAT:

Pak Darmadi, soal anggaran ini.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Ya, terima kasih.

**Pak Menteri dan jajaran,
Ketua KPPU dan yang diwakilkan, Pak Guntur Saragih.**

Saya langsung saja, karena sudah Pak Demmer interupsi. Soal anggaran Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Pak. Yang kurang ini adalah di dalam anggaran perdagangan dalam negeri ini adalah pelatihan untuk UMKM. Undang-Undang 7/2014 Pasal 5 Ayat (3) D, itu di situ tertulis tugas perdagangan dalam negeri. Nah, ini yang harus ada dalam anggaran tersebut. Kenapa, apa yang disampaikan oleh Pak Mukti tadi, saya ingin menggarisbawahi, Pak.

Saya saya meneliti ini tentang *seller-seller* yang berhasil di dalam toko media maupun Shopee. Dari situ saya dapatkan bahwa mereka-mereka yang berhasil ini adalah mereka yang menguasai Pak Menteri, yang menguasai teknik-teknik manajemen. Kalau nggak ada teknik-teknik manajemen, dasarnya, *basic*-nya maka nggak akan bisa berhasil, Pak. Untuk itu perlu dukungan dari Kementerian Perdagangan kepada pedagang pasar dan lain-lain termasuk UMKM itu diajarkan teknik-teknik tersebut. Itu pun kalau diajarkan belum tentu semua berhasil.

Pak Menteri, saya ini 24 tahun ngajar Pak dan saya tahu bahwa yang mereka yang menerapkan prinsip-prinsip itulah yang berhasil. Coba bagaimana mereka berhasil hanya masuk ke Tokopedia, jualan hanyalah asal-asalan, apa lagi yang nggak ngerti pasti nggak akan berhasil. Karena, di dalam itu ada soal *segmentation*, *targeting*, *positioning*. Ada soal *promotion mix*, ada soal *marketing mix* di dalamnya, Pak.

Baru bisa berhasil, baru bisa Diamond nanti menuju ke Diamond, itu pun sekian lama ada 6 bulan bisa, ada yang 3 bulan bisa. Jadi, kalau orang hanya diajarkan *digital marketing* saja, masuk cuma di ajarin pakai *software* kayak gitu, nggak bisa Pak *basic*-nya nggak ada. Bagaimana *price setting*-nya, bagaimana *monitoring competition*-nya di sana, kompetitornya dimonitor

bagaimana. Jadi, saya minta ini Pak oke. Kalau ditanyain itu ya, minta ini aspirasi dan sebagainya itu, jangan nanti nggak dijawab jawab Pak, dijawab ya hanya formatif. Saya minta itu Pak.

Jadi, mohon ya, kalau katanya pedagang pasar mau. Memang bisa kalau hanya pegang *handphone* jualan di Shopee dan Tokopedia terus berhasil, Pak. Nggak bisa Pak di agen *online* itu nggak bisa. *Basic* dasarnya dulu, *basic* dasarnya nggak ada ya enggak bisa berhasil. Itu yang pertama, Pak.

Yang kedua, adalah saya nggak bahas jagung lagi, saya bahas lama ini Pak, nanti ya. Yang kedua, adalah soal perlindungan konsumen, Pak. Saya minta juga di sini pemisahan yang jelas tugas BPKN, tugas BPSK dengan tugas soal perlindungan konsumen di tangan PTKN. Ini tolong diperjelas, Pak. Supaya tidak tumpang tindih. Ini kan Undang-Undang 88/99 kan memang banyak kelemahan, Pak Menteri. Jadi, saya minta ini tolong dimonitor kembali bagaimana pemisahan tugas-tugas itu ke depan untuk perlindungan konsumen yang sangat penting buat ke depan.

Jadi, itu yang ingin saya sampaikan di sini.

Terima kasih Pak, 2 menit.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Darmadi.
Pak Andre terakhir, silakan Pak Andre.

F-PAN (Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M.):

Izin, Pak Ketua.
Kalau masih ada waktu Fraksi PAN.

KETUA RAPAT:

Ya, mudah-mudahan masih cukup untuk paripurna ya.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Tenang, Bu. Saya sebentar doang ini. Saya nggak lama-lama kayak Pak Darmadi dan Nasim. Ah, baik tenan.

***Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***

Yang saya hormati, Pak Faisol Rizal, Ketua Komisi kami yang baik hati, lalu ada Om Dammer, Wakil Ketua Komisi VI, Pak Menteri, duda keren siapa tau ada yang bias cari jodohkan dengan, lalu ada Pak Martin Manurung,

**Teman-teman Anggota Komisi VI, dan
Seluruh mitra kami,
Pak Menteri, jajaran,
KPPU.**

Pertama, untuk KPPU sekali lagi saya mendukung anggaran KPPU, karena terus terang sesuai dengan janji politik saya, karena KPPU sudah konkrit ya. Punya nyali, punya kemampuan untuk apa namanya menyelesaikan laporan kami soal praktek *predatory pricing* Semen Consina dan itu terbukti bukan hanya putus di KPPU, tapi sudah sampai ke MA dan ini sudah inkrah Semen Consina atau terbukti secara sah melakukan praktek *predatory pricing* dan sudah didenda 22,4 miliar. Tentu kita akan mendukung langkah-langkah KPPU. Ya, kita mendukung penuh anggaran KPPU dan saya titip pesan KPPU, sekarang setelah semen coba masuk ke nikel ya. Kemarin saya sudah sampaikan soal praktek apa namanya permainan Surveyor itu, tolong KPPU mendalami hal ini ya. Ini juga merugikan negara dan besarnya ratusan triliun, Pak. Ya, itu satu untuk KPPU.

Untuk Pak Menteri, terima kasih Pak Menteri langkah cepat gerak cepat Kemen Kemendag ya bahwa saya sudah mendapat laporan dari teman-teman asosiasi pengusaha nikel Indonesia. Tim Pak Menteri sudah melakukan pemanggilan dan undangan juga sudah mengundang asosiasi *surveyor*. Tapi, ingin saya sampaikan Pak Menteri, informasi saya dapatkan dari teman-teman pengusaha nikel di kita, lokal nasional bahwa sekarang orang-orang yang memberikan laporan ke Kemendag itu terancam tidak diberikan kesempatan oleh *smelter-smelter* Tiongkok.

Jadi, intinya apa, ada serangan balik Pak Menteri. Jadi, orang-orang pengusaha nasional kita yang memberikan data bentuk kezaliman dari *smelter-smelter* Tiongkok itu ya, *smelter* Tiongkok itu melakukan serangan balik. Mereka terancam tidak lagi bisa menjual nikel-nikel nasional kita ya. Karena terserang, ekspor ditutup. Satu-satunya yang bisa makan nikel itu kan mereka sekarang, karena mereka mohon maaf diduga menguasai semuanya di Republik Indonesia ini. Bisa ngatur-ngatur lah Republik Indonesia ini gitu loh.

Nah, sekarang, karena mereka memberikan laporan kepada satgas perdagangan bahwa ada permainan *kongkalikong* ini Pak Menteri ya. Sekarang mereka diancam balik bahwa mereka tidak akan diberikan kesempatan untuk berjualan. Ini penting juga oleh KPPU, dicek itu ya permainan ini.

Jadi, itu saja Pak Menteri ya. Saya singkat-singkat, karena ini menyangkut ratusan ribu orang Indonesia yang hidup ya dan sumber daya alam kita yang luar biasa.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Singkat padat.

KETUA RAPAT:

Ratusan juta, Pak Andre bukan ratusan ribu.

Baik, silakan Bu Intan. Terima kasih.

F-PAN (Hj. INTAN FAUZI, S.H., L.L.M.):

Bu Sondang dulu tadi kayaknya. Silakan.

KETUA RAPAT:

Agak pendek ya. Karena, kita paripurna.

F-PAN (Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M.):

Iya, siap rapur kita.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih.

**Pimpinan, dan
Teman-teman Anggota Komisi VI yang saya hormati, juga
Pak Menteri Perdagangan, beserta jajaran,
KPPU beserta jajaran,**

Saya hanya singkat, di sini ada penambahan anggaran untuk pelaksanaan G20, karena tentunya Menteri Perdagangan sebagai ketua pelaksana *side event* dan tentunya kita harus mensukseskan ini. Karena, ini adalah *event* besar yang mudah-mudahan juga sebagai langkah untuk pemulihan ekonomi nasional. Hanya di sini disebutkan beberapa item selain pelaksanaan Presidensi G20, ada apa *point* 2,3,4 ini mengenai kemitraan pemasaran, *show case*, produk dalam negeri dan lain-lain. Kita tahu di sini tentu masing-masing dapil juga punya kearifan lokal. Barangkali Ini bisa juga disinergikan untuk dimasukkan di dalam program G20 ini. Itu saja dari saya.

Untuk KPU, saya ingin menanyakan lebih jelas mengenai penambahan perluasan tugas terkait dengan PP 5, penguatan kewirausahaan dan usaha UMKM juga koperasi, PP 6 peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi. Apa saja *breakdown* dari program kerja untuk perluasan dari KPPU ini, karena kalau dilihat dari paparan hari ini masih tugas-tugas alokasi anggaran yang seperti biasanya.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Saya informasikan bahwa Rapat Paripurna sudah mulai. Jadi, mohon Bu Sondang pendek, nanti Pak Menteri dan Pak Wakil Ketua KPPU, Pak Guntur pendek-pendek juga.

F-PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON):

Baik.

Terima kasih Pak Ketua yang sangat arif dan bijaksana.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang kami hormati seluruh teman-teman Anggota Komisi VI, dan juga Pak Menteri Perdagangan, Pak Lutfi beserta seluruh jajarannya, dan juga Wakil Ketua KPPU dan Ketua yang hadir secara virtual beserta seluruh jajarannya.

Saya singkat saja ke Kementerian Perdagangan. Kami cukup prihatin ya melihat postur dari anggaran tahun 2022 yang dianggarkan, karena ini turunnya terlalu cukup signifikan begitu dari 3,135 triliun menjadi 2,380. Padahal kalau tadi yang disampaikan oleh teman-teman seluruhnya mulai dari jagung, mulai dari kemarin kami rapat tentang gula, garam, dan sebagainya. Itu kan perlu pengawasan yang sangat kuat dari Kementerian Perdagangan.

Kenapa saya sampaikan seperti itu, sekarang ini kan kita perlu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Mau nggak mau Pak Menteri dan seluruh jajarannya aktivitas ekonomi dalam negeri yang sekarang harus digenjut. Saya melihat malahan justru di sini porsi anggaran yang paling banyak turun itu malahan adalah Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Ini sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Bagaimana kita bisa melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional, sedangkan tadi teman-teman bilang masalah jagung dan sebagainya dengan pengawasannya harus dalam negeri.

Kemudian, kemarin kami rapat mengenai impor gula apakah itu dalam industri maupun konsumsi. Nah, itu kan penggunaannya juga harus dalam negeri. Nah kami mau, kami harapkan, bagaimana ini bisa apa ya kita ambil solusi supaya jangan sampai penuh penurunan apa namanya anggaran ini bisa berimplikasi kepada pemulihan ekonomi nasional dan saya juga memperkuat apa yang disampaikan oleh rekan kami dari PDI Perjuangan mengenai bagaimana penguatan-penguatan UMKM tidak hanya bisa di hanya diaplikasikan, ini harus dikonkretkan dalam satu bentuk program latihan UMKM, Pak dan ini harus diambil alih oleh Kementerian Perdagangan supaya

benar-benar negara hadir. Bagaimana memperkuat UMKM, terutama pada perdagangan dalam negeri. Supaya bagaimana kita implikasinya nanti penguatan daya saing kepada produk-produk nasional kita bisa tembus ke pasar-pasar ekspor.

Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.
Mudah-mudahan tidak terlalu panjang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Tepat waktu. Terima kasih, Bu Sondang.

Kami persilakan kepada Pak Menteri dan kemudian dari Pak Guntur. Silakan.

MENTERI PERDAGANGAN (MUHAMMAD LUTFI):

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ingin menjawab pertanyaan agak.

KETUA RAPAT:

Agak singkat ya, Pak Menteri ya.

MENTERI PERDAGANGAN (MUHAMMAD LUTFI):

Saya minta maaf ini, Pak Ketua, karena pertanyaannya kenceng, jadi saya jawabnya juga musti jelas dan tetap dan terarah.

Jadi Pak Nasim, masalah daripada resi gudang ini. Inilah masalah yang krusial buat Kementerian Perdagangan. Karena, ini mendekatkan petani dan pedagang, mendekatkan antara petani dan pembeli, meningkatkan harkat dan martabat daripada petani-petani kita. Jadi, Pak Nasim apa yang saya kerjakan makanya kacau balau di resi gudang itu. Saya berhentikan kepala Bappeti yang lama, yang baru nih saya datangkan Pak Pak Wisnu ini pernah menjadi Kepala Bappeti, yang menjadi Kepala Bappeti lagi. Sekarang lagi cari orang baru, karena masih ada yang mengurus tata kelola di Kementerian di di Dirjen Perdagangan Luar Negeri sana.

Jadi, ini saya akan bereskan dan saya akan selesai kan. Memang, Covid-19 ini merusak daripada tatanan kerja di Kementerian Perdagangan. Karena, kita mempunyai prioritas-prioritas. Sebagai manusia kita tertekan dalam ruang dan waktu. Jadi, ini akan saya bereskan tetapi menuju ke sana itu kita bereskan. Saya berhentikan yang lama, saya cari yang baru untuk memastikan bahwa harkat, martabat kita bisa jalan. Ya Pak Nasim ya.

Ibu Nevi, anggaran biaya ini terutama masalah *online*. Jadi, kalau kita lihat ini sekarang pertemuan G20 yang akan datang ini adalah *offline*. Kemudian, New York *Fashion Week* itu *offline*. Pertandingan-pertandingan olahraga *offline*. Jadi, menjelang kita hidup dengan normal dengan pandemi yang menjadi dari epidemi biasa. Ini kita lagi mencoba untuk hidup bersama-sama, Jadi, oleh sebab itu, dana ini akan kita keluarkan terpaksa dan Ibu Nevi, saya kemarin ikut sidang ASEAN, *Economic Ministers* dengan Zoom tidak bisa mendapatkan keputusan-keputusan yang baik, karena kita melalui *online* tersebut. Jadi, kita harus balik ke sana lagi.

Jadi, saya tidak bisa menjawab tentang masalah daripada BPN, karena ini di luar tupoksi saya, tetapi yang pasti yang kita kerjakan ini masih kita menjadi tanggung jawab, gitu kan ya.

Saya ingin menjawab pertanyaan dari pada Bu Mufti, Pak Mufti dari masalah harga pakan jagung. Kalau kita punya sekarang 2,3 juta jagung, mungkin nggak harganya naik meroket seperti itu. Tidak mungkin.

F-PDIP (dr. H. MUFTI A.N. ANAM):

Jadi, Kementan ini bohong Pak?

MENTERI PERDAGANGAN (MUHAMMAD LUTFI):

Iya gini, kalau ada barangnya. Sekarang, kita jangan ngomong jutaan, ngomong 7.000 aja nggak ada buat kebutuhan 1 bulan di Blitar. Nggak ada barangnya.

F-PDIP (dr. H. MUFTI A.N. ANAM):

Bohong Kementan, Pak.

MENTERI PERDAGANGAN (MUHAMMAD LUTFI):

Saya gini, saya nggak mau tunjuk-tunjuk.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Nggak, katanya barangnya ada tangan tengkulak besar.

MENTERI PERDAGANGAN (MUHAMMAD LUTFI):

Gini, sekarang kita udah cek orang itu. 7.000 aja nggak ada untuk keperluan Blitar 1 bulan tidak ada, barangnya. Jadi, dan tapi gini Pak, saya ini sudah tulis surat, bulan Maret tulis surat resmi. Hati-hati kalau kedelai kita tidak ada tata niaganya. Saya tahu harganya akan tinggi, tetapi tidak akan kurang barangnya. Jagung pada saat yang bersamaan tata niaganya diatur, tidak bisa sembarangan orang impor karena musti minta persetujuan daripada Kementerian Pertanian. Saya sudah tulis surat bahwa itu mesti

dipikirkan. Kenapa, karena harga komoditas dasar nih naik. Sekarang Mas Mufti, Pak Mufti mereka impor.

F-PDIP (dr. H. MUFTI A.N. ANAM):

Pak, sebentar. Suratnya ditulis ke mana Pak? dikirim ke Kementan?

MENTERI PERDAGANGAN (MUHAMMAD LUTFI):

Ke mereka dong, ke Kementerian Perekonomian sebagai standar ini, saya bilang ada barang-barang, ada barang-barang yang sangat sensitif. Saya minta *off the record* ya, karena nggak bisa diceritain semuanya. Daging sapi persoalan, dan ini sekarang Brazil kedatangan dengan *meat cell disease*. Ini menyebabkan cadangan ini kacau, tapi saya sudah perintahkan dari, saya sudah tulis surat dari awal tahun. Saya sudah prediksi bahwa harga jagung ini akan tinggi. Kenapa, karena harga kedelai dan harga yang lainnya juga tinggi.

Nah, sekarang saya tidak mau menuju-nunjuk. Tapi sekarang, kalau kita punya dua juta, apa mungkin harga jagung yang sekarang itu batasannya 4.000 bisa menjadi 6.100, tidak benar 7.500, 6.100 hari ini.

F-PDIP (dr. H. MUFTI A.N. ANAM):

Tapi mohon izin, Menteri Perdagangan masa tugasnya hanya menulis surat, nggak ada kebijakan yang jenenan ambil soal ini ketika ini.

MENTERI PERDAGANGAN (MUHAMMAD LUTFI):

Nggak Pak, ini undang-undangnya masih musti ada rekomendasi adanya di Kementerian Pertanian. Gak bisa saya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab ininya.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Pak Pak Pak, Pak Menteri. Bisa dipastikan nggak bahwa tengkulak besar nggak menguasai *stock*.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Hari ini Pak, kalau ada 7.000 aja sudah bagus. Ini kalau ada masih dikumpulin dari seluruh Indonesia ada 7.000.

F-PDIP (dr. H. MUFTI A.N. ANAM):

Ini Pak datanya Pak.

MENTERI PERDAGANGAN (MUHAMMAD LUTFI):

Kita butuhnya.

F-PDIP (dr. H. MUFTI A.N. ANAM):

Ya, sebentar Bos. Saya anu, ini data Kementan ini Pak ini minggu ini Pak saya dapatkan dari Kementan langsung. Perinciannya 744.250 ton berada di pengepul 95.000 ton berada di grosir 42, 423.000 berada di agen, 29.000 ton berada distributor, Pak. Jadi, ini sebenarnya sudah ada barang yang beredar juga, Pak.

MENTERI PERDAGANGAN (MUHAMMAD LUTFI):

Jadi, gini Pak, kalau itu benar ada barangnya tidak mungkin hari ini loncat dari 1.500, ke 4.500, ke 6.100.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Bener, *supply and demand*, Pak.

MENTERI PERDAGANGAN (MUHAMMAD LUTFI):

Ini *supply* dan *demand* gitu. Jadi Pak, jadi Pak saya terus terang aja. Ini *off the record*. Ini kalau kita bicara ini sekarang, ini akan jauh lebih seram lagi bulan depan. Karena, ini masa tanam kan, paceklik. Bulan depan kayak gini, Pak. Saya dari pertama kali sudah prediksi bahwa harga kedelai itu akan tinggi, tetapi barang ada. Jadi, adalah gojalak-gojalak sedikit, tapi barang ada. Jadi, saya kasih harga oh, tahu akan jadi 16.000 ya, akan jadi 15.000 ya. Saya kasih tahu. Jadinya, kita bekerja bersamaan.

Sekarang kalau barangnya tidak ada, ini harga naik, mau cari ke mana barangnya. Jadi, Pak Mufti, saya minta maaf bukan saya mau tunjuk-tunjukkan. Kalau harganya ada, sekarang barangnya ada sebesar yang dua juta itu, kita nggak bicara masalah itu di sini dan ini masalahnya itu meluluh meluluh lantakkan daripada *layer* kita. Bisa dibayangkan, pada saat harga jagung 6.100, itu 70% dari ongkos itu di pakkat harga telurnya turun. Kenapa, karena memang daya belinya turun. Ini yang menjadi masalah.

Jadi, saya ketika hari Rabu dipanggil, hari Kamis Kementerian Perdagangan sudah tulis surat kita siap untuk bagaimana mensubsidikan. Tunjukkan di mana barangnya, kita kasih subsidiya, saya tanggung jawab oke pake anggaran subsidiya. Di manapun barangnya mau lokal, mau impor.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Pak, itu pakai CSHP.

MENTERI PERDAGANGAN (MUHAMMAD LUTFI):

CSHP.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Sekarang, tadi CSHP udah diandalkan nih dari Bapak nih.

MENTERI PERDAGANGAN (MUHAMMAD LUTFI):

Udah sudah, saya sudah.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Nggak, untuk untuk ke depan.

MENTERI PERDAGANGAN (MUHAMMAD LUTFI):

Sudah.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Kan hanya 30.000 ton, bagaimana bisa menurunkan harga.

MENTERI PERDAGANGAN (MUHAMMAD LUTFI):

Gini Pak, kebutuhannya itu buat bulan ini tuh kan kita musti *realistic* 30.000. Saya siapin sekarang, karena menunggu apa jangan-jangan ada *lay over* data yang saya tidak tahu masalah jagung ini. Jadi, kita butuhkan ini untuk 1 bulan ini di Blitar, di mana Tasik, ada Lampung, ada 4 (empat) tempat 30.000.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Nggak, berapa dana CSHP Bapak yang tersedia untuk bisa subsidi.

MENTERI PERDAGANGAN (MUHAMMAD LUTFI):

Sekarang ini Pak, kalau kita perlunya kalau 1.500 kali 30.000, 45 miliar.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Itu kan kecil 45 M nggak ada artinya.

MENTERI PERDAGANGAN (MUHAMMAD LUTFI):

Pak, kita sekarang bicara hari ini, depan presiden biar harga turun.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Saya mau tau CSHP berapa yang bisa digunakan.

MENTERI PERDAGANGAN (MUHAMMAD LUTFI):

Kita ada duit kira-kira 1,5 T.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

1,5 T. Oke.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Baik, kita targetkan Pak.

MENTERI PERDAGANGAN (MUHAMMAD LUTFI):

Jadi Pak, jadi jadi kita saya saya pingin ini Pak Ketua.

Kedua, masalah daripada apa yang suntik vaksin itu. Pak Mufti, saya nggak punya hak siapa yang musti divaksin. Di kota Padang, saya pergi sama Bung Andre Rosiade, kota Padang itu kasih kasih vaksin itu kepada pedagang pasar, Pak, ditaruh di pasar.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Jakarta minta dong, Pak bareng nanti.

MENTERI PERDAGANGAN (MUHAMMAD LUTFI):

Apa.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Minta-minta.

MENTERI PERDAGANGAN (MUHAMMAD LUTFI):

Gini Pak Prof, saya tidak bisa menentukan. Tapi, waktu saya mau kerjakan, saya studi di Pasar Sederhana Bandung itu cuman 8,9%. Kalau syaratnya disamakan dengan mal, artinya pasar itu tutup nggak ada yang boleh dagang, kan enggak bisa itu.

Jadi, apa yang kita kerjakan, Pak Oke datang langsung karena, kita baru tahu ternyata distribusi vaksinnya belum beres, kita minta tolong supaya jalan. Tahu Pak, Pak Mufti dapat berapa kemarin, 200 di Tanah Abang hanya 200. Jadi, nggak semudah itu tapi kita terus kerjakan terus supaya bisa jalan.

F-PDIP (dr. H. MUFTI A.N. ANAM):

Ngapunten sebelumnya, mohon maaf bukan bermaksud membandingkan, Pak ya. Tapi kenapa ya, kok Kementerian Koperasi UMKM itu bisa melakukan vaksinasi ribuan bahkan ratusan ribu untuk pelaku UMKM di daerah-daerah begitu.

MENTERI PERDAGANGAN (MUHAMMAD LUTFI):

Nah begini Pak, gini. Saya, saya.

KETUA RAPAT:

Saya mohon maaf ya, karena ini kita betul-betul dibatasi oleh waktu, Pak Menteri dan teman-teman semua. Rapat Paripurna sudah jalan dan kita harus

segera tutup. Saya minta nanti jawaban-jawabannya di juga diberikan secara tertulis.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Satu satu saja, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Darmadi.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Akses, nggak Pak Jakarta. Akses akses vaksin ada, yang saya minta Bapak bisa ke Andre, Bapak datang dengan saya, vaksin nggak usah pikirin. Datang juga ke Jakarta Pak dan Menteri Perdagangan kunjungi. Vaksin saya sediakan.

KETUA RAPAT:

Dijadwalkan bersama saya juga Pak Darmadi.

Silakan Pak, saya mohon maaf Pak Menteri. Ini karena betul-betul dibatasi waktu.

Pak Guntur silakan sebentar menjawab.

WAKIL KETUA KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA :

Terima kasih.

**Pak Pimpinan, dan
Anggota Komisi VI yang saya hormati,**

Ya, saya jawab dari Bu Nevi terkait *marger* Gojek dan Tokopedia. Kita lakukan penilaian komprehensif, Bu. Itu kita masih dalam proses penilaian, walaupun tetap tantangannya adalah kami *post marger*, Bu. Lapornya itu *post*. Jadi, kita berharap semangat untuk amandemen untuk itu menjadi *pre* tetap ada, Bu. Tapi kita lakukan penilaian secara komprehensif.

Untuk Pak Andre. Terima kasih Pak Andre atas dukungannya untuk KPPU. Namun, memang secara formil belum ada laporan ke kami tentang nikel, Pak Andre. Jadi, kalau ada laporan ke Kemendag, ke kami belum ada. Mohon, kalau memang ada tentunya kita akan berjalan sesuai dengan prosedur.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Pak Guntur, nanti saya minta asosiasi pengusaha nikel lapor ke Bapak.

Terima kasih.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Pak Guntur, saya minta kajian Permenperin 3/2021 dilakukan KPPU.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, masih ada Pak Guntur.

WAKIL KETUA KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA:

Berikutnya tentang PP UMKM dari Bu Intan. Ya ya Bu, kita sudah kemitraan dan periode kami kemitraan masih dalam pengawasan, termasuk dalam penegakan hukum. Jadi, kita juga konsen dan walaupun memang dukungan untuk anggaran masih terbatas karena kondisi Covid.

Terakhir dari saya Pimpinan :

*“Kalau sudah banyak yang ditanam,
Sudah pasti panen akan digenggam.
Kalau sudah kami RDP dengan Komisi VI,
Kami siap kerja siang dan malam”.*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Nanti diulang di, diulang setelah kesimpulan.

Terima kasih, kami ucapkan kepada saudara Menteri Perdagangan dan Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atas pertanyaan dan tanggapan yang belum dijawab, mohon dijawab secara tertulis.

Silakan, Sekertariat menampilkan draft kesimpulan.

Draft kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPRRI dengan Menteri Perdagangan dan dengan dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPRRI dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait penyesuaian RKA KL Tahun 2022 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran. Selasa, 21 September 2021.

I. Kementerian Perdagangan.

1. Komisi VI DPRRI menyetujui penyesuaian alokasi anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2022 sebesar Rp2.380.059.957.000,- yang dialokasikan ke dalam 4 (empat) program sebagai berikut:
 - a. Program dukungan manajemen sebesar Rp1.233.291.149.000,-;

- b. Program perdagangan dalam negeri sebesar Rp744.533.076.000,-;
- c. Program perdagangan luar negeri sebesar Rp391.630.456.000,-;
- d. Program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp10.605.276.000,-.

Selanjutnya, Komisi VI DPRRI akan menyampaikan kepada Badan Anggaran sebagai bahan akhir penetapan.

Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

II. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Komisi VI DPRRI menyetujui penyesuaian alokasi anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp99.726.648.000,- yang dialokasikan dalam:

- a. Program dukungan manajemen sebesar Rp14.130.428.000,-;
- b. Program pengawasan persaingan usaha sebesar Rp16.408.023.000,-;
- c. Belanja pegawai sebesar Rp44.120.992.000,-;
- d. Belanja operasional sebesar Rp25.067.205.000,-.

Selanjutnya, Komisi VI DPRRI akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPRRI sebagai bahan akhir penetapan.

Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

Baik, Bapak Ibu sekalian.

Sebagaimana lazimnya sebelum rapat ditutup, terlebih dahulu kami persilakan kepada saudara Menteri Perdagangan mewakili juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang hadir pada hari ini dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat untuk menyampaikan kata akhir.

Silakan, Pak Menteri.

MENTERI PERDAGANGAN (MUHAMMAD LUTFI):

Terima kasih, Pak Ketua.
Saya singkat saja.

Terima kasih kepada Komisi VI DPRRI atas kerja samanya. Saya ini juga mungkin atas nama KPPU juga bahwa kita memang musti suatu mekanisme pekerjaan yang baik dan kerja sama yang baik. Saya juga berterima kasih dengan pandangan-pandangannya hangat pada pagi hari ini. Ini juga memicu kita, tetapi yakinlah bahwa Kementerian Perdagangan datang di sini beserta KPPU untuk memastikan bahwa terjadinya perdagangan yang

adil dan perdagangan yang bermanfaat salah satunya memastikan bahwa pedagang-pedagang kita mendapatkan kesempatan yang baik untuk bisa bersaing di era global ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Sebelum ditutup saya mohon maaf, karena memang kita dikasih waktu oleh Badan Anggaran hanya 3 hari ya, 3 hari. Jadi, kita tidak punya waktu banyak, tapi atas waktu yang sedikit ini saya menyampaikan terima kasih atas semua pandangan dan masukan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat kali ini. Saya mohon maaf juga kepada Pak Menteri tidak bisa memberikan jawaban lebih panjang, karena keterbatasan waktu.

Terima kasih, kami sampaikan kepada Saudara Menteri Perdagangan dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha beserta jajaran. Atas nama Pimpinan Komisi VI DPRRI, kami menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada seluruh anggota yang selama ini hadir dengan sabar dan penuh perhatian, bijaksana mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat pada hari ini.

Demikian rapat kami tutup.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.40 WIB)

JAKARTA, 21 SEPTEMBER 2021
a.n KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP.197104071992032001